

# STATISTIK

# INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI ACEH**

# STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2021



# STATISTIK INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI ACEH 2021

---

No. ISSN : 2714-9641  
Katalog BPS : 6104006.11  
No. Publikasi : 11530.2204  
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : 58 Halaman

Naskah:  
Fungsi Statistik Produksi BPS Provinsi Aceh

Gambar Kulit:  
Fungsi Statistik Produksi BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan Oleh:  
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

***Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya***

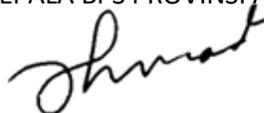
## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil Provinsi Aceh 2021 merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2021 (VIMK21) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dengan metode sampel. Publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri manufaktur yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 - 19 orang, yang meliputi antara lain; banyaknya usaha industri mikro dan kecil, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran dan pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, kemitraan usaha, penggunaan internet serta pemasaran usaha produksi industri dan mikro dan kecil di seluruh wilayah Aceh.

Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah maupun konsumen data. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan referensi untuk berbagai penelitian atau studi khusus yang berkaitan dengan industri mikro dan kecil.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi khususnya para responden, narasumber, serta tim yang telah menyelesaikan publikasi ini.

Banda Aceh, Desember 2022  
KEPALA BPS PROVINSI ACEH



**AHMADRISWAN NASUTION**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
PENJELASAN UMUM.....	2
A. Pendahuluan .....	2
B. Tujuan .....	2
C. Lingkup dan Cakupan.....	3
D. Dokumen yang Digunakan .....	3
E. Metodologi .....	4
F. Organisasi Lapangan .....	5
G. Konsep dan Definisi .....	6
ULASAN RINGKAS .....	17
A. Karakteristik Usaha IMK.....	17
B. Karakteristik Tenaga Kerja dan Balas Jasa .....	19
C. Karakteristik Pengusaha IMK .....	23
D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran .....	25
LAMPIRAN TABEL .....	39

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja Tahun 2021 .....	19
Tabel 2 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2021 .....	20
Tabel 3 Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerja Tahun 2021 .....	23
Tabel 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2021 .....	29
Tabel 5 Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2021 .....	32
Tabel 6 Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Terdampak Pandemi dan Dampak yang Dirasakan Tahun 2021 .....	36

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gambar 1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Industri (KBLI) Tahun 2021 ..... 18
Gambar 2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2021 ..... 20
Gambar 3	Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021 ..... 21
Gambar 4	Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021 ..... 22
Gambar 5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2021 ..... 24
Gambar 6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2021 ..... 25
Gambar 7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Tahun 2021 ..... 26
Gambar 8	Persentase Usaha Mikro Kecil menurut Sumber Modal Utama Tahun 2021 ..... 27
Gambar 9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2021 ..... 28
Gambar 10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2021..... 30
Gambar 11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalin Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2021 ..... 31
Gambar 12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan/Bantuan yang Diterima Tahun 2021..... 32
Gambar 13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Tahun 2021 ..... 33
Gambar 14	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Penggunaan Internet Tahun 2021..... 34
Gambar 15	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Konsumen Utama Tahun 2021..... 35
Gambar 16	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Strategi Menghadapi Dampak Pandemi Tahun 2021..... 36
Gambar 17	Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Bantuan atau Kebijakan yang Dibutuhkan Tahun 2021..... 37

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Pekerja di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 39
Tabel 2	Banyaknya Usaha, Pekerja, Pendapatan, Pengeluaran dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2021.. 39
Tabel 3	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 40
Tabel 4	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 40
Tabel 5	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 41
Tabel 6	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidik yang ditamatkan di Provinsi Aceh Tahun 2021..... 41
Tabel 7	Banyaknya Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 42
Tabel 8	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 42
Tabel 9	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 43
Tabel 10	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 43
Tabel 11	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 44
Tabel 12	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 44
Tabel 13	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 45
Tabel 14	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 45
Tabel 15	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2021 ..... 46

Tabel 16	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	46
Tabel 17	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan/Bantuan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2021.....	47
Tabel 18	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	47
Tabel 19	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Penggunaan Internet dan Tujuan Menggunakan Internet di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	48
Tabel 20	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Konsumen Utama di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	48
Tabel 21	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Terdampak Pandemi dan Dampak yang Dirasakan di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	49
Tabel 22	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Strategi Menghadapi Dampak Pandemi di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	49
Tabel 23	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Bantuan/Kebijakan yang Dibutuhkan Menghadapi Pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	50
Tabel 24	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Terdampak Pandemi Covid-19 menurut Perkiraan Lama Usaha Dapat Bertahan Bila Tidak Ada Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2021 .....	50

# PENJELASAN UMUM

<https://lacen.tbps.go.id>

# PENJELASAN UMUM

## A. Pendahuluan

Usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja tanpa harus mensyaratkan jenjang pendidikan formal yang tinggi. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri, khususnya IMK cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Dalam era pasca krisis ekonomi dan otonomi daerah saat ini, pengumpulan data statistik IMK mempunyai arti yang sangat strategis. Data yang dihasilkan merupakan masukan yang sangat berguna untuk berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya usaha IMK.

Pengumpulan data IMK mulai tahun 2009 dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pengumpulan data sebelumnya dilakukan hanya secara periodik melalui sensus atau survei. Pengumpulan data IMK dilaksanakan secara lengkap melalui sensus industri 1974/1975. Kemudian Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga (IKKR) tahun 1982, Sensus Ekonomi tahun 1986 (SE86), kemudian tahun 1991, 1993, 1994, dan 1995 melalui survei IKKR. Data IMK tahun 1996 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 1996 (SE96) dan sejak tahun 1998-2005 data IMK dikumpulkan melalui Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), sedangkan data IMK tahun 2006 dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE06).

Survei Industri Mikro dan Kecil 2021 (VIMK21) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan dalam VIMK21 sampel dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

## B. Tujuan

Secara umum VIMK21 bertujuan untuk memberikan gambaran umum usaha IMK di Aceh selama tahun 2021 yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK21 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat provinsi.

Secara khusus tujuan VIMK21 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut dua digit KBLI, sebagai estimasi indikator IMK seperti:

- a. Jumlah usaha
- b. Pekerja dan balas jasa
- c. Keterangan usaha yang mencakup kendala dan pola kemitraan usaha
- d. Sumber permodalan
- e. Penggunaan internet
- f. Bimbingan dan pemasaran
- g. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

### C. Lingkup dan Cakupan

Survei IMK Tahunan 2021 ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota daerah potensi seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 13.156 blok sensus dan mencakup 90.531 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Untuk wilayah Aceh terpilih sebanyak 445 blok sensus yang mencakup 3.115 perusahaan/usaha mikro dan kecil untuk seluruh kabupaten/kota. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

### D. Dokumen yang digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2021 serta kegunaannya sebagai berikut:

1. **VIMK21-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus)**, digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. **VIMK21-L2 (Listing)**, digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. **VIMK21-DS2 (Daftar Sampel)**, digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
4. **VIMK21-S2 (Sampel)**, digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
5. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI industri manufaktur, dan pedoman pengolahan.

## E. Metodologi

### 1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Survei Industri Mikro dan Kecil 2021 Tahunan (VIMK21 Tahunan) terdiri 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

- a) **Kerangka sampel blok sensus** digunakan untuk pemilihan sampel blok sensus. Kerangka sampel ini merupakan daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri pengolahan skala mikro dan kecil hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) beserta informasi penimbangannya. Blok sensus ini memuat usaha industri pengolahan skala mikro dan kecil dengan KBLI 2-digit, 10 s.d. 33 (blok sensus *eligible*).
- b) **Kerangka sampel usaha/perusahaan IMK** digunakan untuk pemilihan sampel usaha industri pengolahan skala mikro dan kecil. Kerangka sampel ini merupakan daftar usaha hasil pendaftaran (listing) usaha industri mikro dan kecil. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri mikro dan industri kecil.

### 2. Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus mencakup seluruh blok sensus pada kerangka sampel blok sensus dengan tujuan membentuk strata konsentrasi usaha berdasarkan jumlah relatif usaha industri pengolahan skala mikro dan kecil menurut jenis golongan pokok KBLI Tahun 2020 2-digit. Untuk setiap jenis usaha (KBLI 2-digit), strata konsentrasi adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi usaha didominasi oleh jenis usaha tertentu. Stratifikasi blok sensus ini dilakukan pada level kabupaten.

### 3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan yaitu rancangan penarikan sampel dua tahap terstratifikasi.

#### Tahap pertama:

- 1) Dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara probability proportional to size (PPS) dengan size banyaknya usaha IMK hasil pendaftaran (listing) usaha IMK pada kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara independent.
- 2) Pengalokasian Usaha IMK per Kabupaten/Kota

Pengalokasian jumlah usaha IMK per kabupaten/kota dilakukan oleh BPS Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah IMK hasil listing per kabupaten/kota.

a) Untuk target usaha industri kecil diperoleh dari komposisi IK pada hasil SE2016.

b) Target sampel usaha industri mikro diperoleh dengan cara mengurangi jumlah target sampel IMK provinsi dengan jumlah industri kecil (IK) untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Pengalokasian IM dilakukan dengan cara square root proporsional terhadap jumlah square root IM di masing-masing kabupaten/kota.

c) Hasil alokasi IM dan IK per kabupaten/kota dikembalikan ke masing-masing kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan pengalokasian menurut KBLI.

**Tahap kedua:** pengambilan sampel usaha di blok sensus.

1) Mengalokasikan target usaha ke dalam blok sensus terpilih.

2) Memilih sampel usaha IMK dengan cara sistematis.

3) Perusahaan/usaha yang terpilih tercetak ke Daftar Sampel VIMK-DS2 sebagai bekal petugas dalam melakukan pencacahan pada perusahaan/usaha tersebut.

## **F. Organisasi Lapangan**

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK21, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai *subject matter* adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK21 adalah :

a. Petugas Pencacah Sampel (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS/Mitra.

b. Petugas Pemeriksa (PMS): Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

c. Koordinator pelaksanaan di Kecamatan : KSK (aparatus BPS pada tingkat kecamatan).

d. Koordinator pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota: Kepala BPS Kabupaten/Kota.

e. Koordinator pelaksanaan di tingkat Provinsi : Kepala BPS Provinsi.

## G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK21.

- a. **Industri manufaktur** adalah kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri pengolahan (*maklun*).
- b. **Perusahaan/usaha industri manufaktur** adalah unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri pengolahan; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. **Perusahaan/usaha jasa industri manufaktur** adalah unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (*maklun*).
- d. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI yang digunakan dalam survei ini adalah sesuai Perka BPS Nomor 2 tahun 2020.
- e. **Industri mikro** adalah perusahaan industri manufaktur yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang.
- f. **Industri kecil** adalah perusahaan industri manufaktur yang tenaga kerjanya antara 5-19 orang.
- g. **Kegiatan utama** yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:
  - 1) Produk yang mempunyai **nilai produk/jasa industri** terbesar;
  - 2) Jika nilai produk/jasa industri sama besar, maka kegiatan utamanya adalah produk yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
  - 3) Jika nilai produk/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka kegiatan utamanya adalah produk yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;

- 4) Jika nilai produk/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka kegiatan utamanya adalah ditentukan menurut **pengakuan** responden.

**h. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**

- 1) **Tidak tamat SD** : Tidak/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat setingkat Sekolah Dasar.
  - 2) **SD & Sederajat** : Tamat setingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
  - 3) **SMP & Sederajat** : Tamat Sekolah Menengah Pertama, baik yang umum maupun kejuruan, serta pendidikan yang setingkat SMP seperti: Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Pertanian Menengah Pertama.
  - 4) **SMA/Madrasah Aliyah/Paket C**: Tamat dari Sekolah Menengah Atas, baik yang umum, serta jenjang pendidikan yang setingkat SMA seperti Madrasah Aliyah.
  - 5) **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** : Tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan setingkat SMA.
  - 6) **Diploma I/II/III** : Tamat Diploma I atau Diploma II atau Diploma III pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta 1 atau Akta 2 atau Akta 3 termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I, Diploma II atau Diploma III. Pendidikan lainnya yang setara dengan DI/DII adalah SGO, SGPLB, PGSPL, PGA, PGTK, KPG, SAA, Sekolah Bidan. Pendidikan lainnya yang setara dengan DIII adalah Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda meski sudah sampai semester 8/9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SMA.
  - 7) **Diploma IV/S1** : Tamat program pendidikan Diploma 4 dan Sarjana (Strata-1).
  - 8) **S2/S3** : Tamat program pendidikan pasca sarjana/doktor.
- i. Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial** adalah tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru, dengan catatan:
- 1) Bila terjadi perubahan KBLI-2 digit, maka tahun beroperasi adalah tahun KBLI tersebut berubah.

- 2) Suatu usaha yang merupakan cabang maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.
- 3) Apabila selama perjalanan usahanya suatu usaha pernah mengalami masa tidak beroperasi/tidak aktif (misal karena renovasi) maka tahun mulai beroperasi adalah tetap tahun yang lama.
- 4) Apabila suatu usaha/perusahaan mengalami perubahan kepemilikan maka tahun mulai beroperasi adalah tahun pemilik pertama menjalankan usahanya.

**j. Pekerja**

- 1) **Pekerja tetap dibayar** adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) **Pekerja tetap tidak dibayar** adalah tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.
- 3) **Pekerja produksi** adalah tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.
- 4) **Pekerja lainnya** adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

**k. Balas jasa pekerja dibayar (dalam rupiah):** Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.

- 1) **Upah/gaji** adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
- 2) **Upah lembur** adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.

- 3) **Hadiah** adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
  - 4) **Bonus** adalah pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.
  - 5) **Tunjangan** adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- I. **Biaya/pengeluaran** adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:
- 1) **Bahan baku** adalah komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.
  - 2) **Bahan penolong** adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.
  - 3) **Bahan bakar** adalah segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
  - 4) **Pelumas** adalah zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.
  - 5) **Pemakaian Listrik adalah** biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.
  - 6) **Pemakaian air** (yang bernilai ekonomis) adalah biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.
  - 7) **Angkutan/pengiriman, dan pos** adalah seluruh biaya pengangkutan, pengiriman, dan pos yang digunakan untuk kelancaran usaha.

- 8) **Telepon, internet dan komunikasi lainnya** adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan telepon, internet dan komunikasi lainnya termasuk pembelian pulsa atau paket data untuk kepentingan perusahaan.
- 9) **Alat tulis dan keperluan kantor (ATK)** adalah semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya (tidak termasuk sisa/stok yang belum digunakan).
- 10) **Bunga atas pinjaman** adalah pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2012, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.
- 11) **Sewa tanah atau bangunan untuk usaha** adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha atas penggunaan tanah atau bangunan milik pihak lain.
- 12) **Sewa kendaraan, mesin, alat perlengkapan, dan barang modal lainnya** adalah pengeluaran yang digunakan untuk sewa kendaraan (tanpa operator), mesin, alat-alat perlengkapan (tanpa operator) dan barang modal lainnya.
- 13) **Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal** adalah pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.
- 14) **Pajak tak langsung** adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.
- 15) **Kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan** adalah semua bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual. Seperti: kertas pembungkus, kantong plastik termasuk kayu pengepak. Yang diisikan adalah nilai dari bahan-bahan yang telah digunakan, tidak termasuk sisa (stok)

yang belum digunakan.

**16) Jasa industri yang dikerjakan pihak lain adalah** seluruh pengeluaran atas jasa industri pihak lain yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha. Misalnya, biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan menjahit baju/konveksi yang diborongkan kepada pihak lain, pemotongan balok kayu yang dikerjakan pihak lain, dan lain-lain.

**17) Jasa yang dikerjakan pihak lain adalah** seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kelancaran kegiatan/usaha. Misalnya pembayaran biaya jasa akuntan/konsultan, biaya untuk asuransi kerugian, biaya promosi/iklan, dll.

**Pembayaran jasa lainnya** adalah seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

**Biaya jasa akuntan/konsultan** adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

**Biaya untuk asuransi kerugian** adalah premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

**Promosi/iklan** adalah biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

**Lainnya** merupakan biaya yang dikeluarkan oleh usaha/perusahaan untuk kelancaran dan menunjang kegiatan usaha. Contoh: royalti (merk dagang/hak paten), perijinan, pembelian peralatan penunjang kegiatan proses produksi yang umur pemakaiannya kurang dari setahun (misal: serokan/pengki, ayakan/saringan, pikulan, jarum jahit, *wearpack*, *extra fooding* dan sejenisnya), retribusi, iuran, biaya sertifikasi, dsb.

#### **m. Pendapatan**

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (maklun), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

**1) Pendapatan dari produksi dan pendapatan dari jasa maklun:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama,

sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi).

**2) Pendapatan dari kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.

- a. **Keuntungan/kerugian penjualan barang dalam bentuk yang sama:** selisih nilai jual dan beli dari barang-barang dalam bentuk yang sama (tanpa mengalami perubahan bentuk/tanpa diproses)
- b. **Deviden:** pendapatan dari saham baik yang diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan di bursa efek.
- c. **Hasil imputasi:** nilai pendapatan hasil imputasi bahan baku yang secara ril tidak dikeluarkan.
- d. **Sumbangan, hibah, hadiah, dan sejenisnya:** nilai pendapatan berupa transfer dari pihak lain (sumbangan, hibah, hadiah dan sejenisnya).

**3) Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

**n. Sumber modal :** Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap.

Sumber modal dapat berasal dari:

**1) Milik sendiri :** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/ usaha/ pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.

**2) Pihak lain :** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK18 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.

- a. **Bank :** Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
- b. **Koperasi :** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

- c. **Lembaga keuangan bukan bank** : Lembaga keuangan selain bank dan koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- d. **Modal ventura** : Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e. **Keluarga/famili** : Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.
- f. **Lainnya** : Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

**o. Kendala, kemitraan, dan bimbingan/pelatihan/penyuluhan**

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2021, keanggotaan koperasi, kemitraan dan bimbingan usaha.

- 1) **Kendala usaha**: faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah usaha mencapai suatu tujuan usaha.
- 2) **Kemitraan**: hubungan kerjasama dengan usaha/perusahaan lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.
- 3) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan**: Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti pekerja (terhitung mulai dari usaha/perusahaan itu beroperasi secara komersial). Bimbingan/pelatihan/penyuluhan meliputi manajerial terkait dengan pengelolaan usaha, teknik produksi, pemasaran dan lainnya.
- 4) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial**: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.
- 5) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/teknik produksi**: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.
- 6) **Bimbingan/penyuluhan pemasaran**: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara

mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

**p. Sumber air**

- 1) **Air tanah:** air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.
- 2) **Air kemasan/isi ulang:** air dalam kemasan baik mempunyai merk dagang maupun tidak.
- 3) **Usaha/perusahaan air minum/air baku:** air yang diproduksi oleh perusahaan baik melalui jaringan pipa atau media penjualan air lainnya.
- 4) **Sungai/danau/waduk:** jenis air dari permukaan tanah, termasuk kolam dan irigasi.

**q. Internet dan pemasaran**

**Internet** adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.

**Pemasaran** adalah proses, cara, perbuatan memasarkan atau menyebarluaskan suatu produk/barang atau jasa.

- r. **Pandemi Covid-19** adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*) di semua negara di seluruh dunia.

**H. Data yang Disajikan**

Data yang disajikan pada Publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil 2021 ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Perka BPS Nomor 2 tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- |  |          |
|--|----------|
| a. Industri Makanan  | KBLI: 10 |
| b. Industri Minuman  | KBLI: 11 |
| c. Industri Pengolahan Tembakau  | KBLI: 12 |
| d. Industri Tekstil  | KBLI: 13 |
| e. Industri Pakaian Jadi   | KBLI: 14 |
| f. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki   | KBLI: 15 |
| g. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya. | KBLI: 16 |
| h. Industri Kertas dan barang dari Kertas  | KBLI: 17 |
| i. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman  | KBLI: 18 |
| j. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia  | KBLI: 20 |
| k. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional  | KBLI: 21 |

l. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	KBLI: 22
m. Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI: 23
n. Industri Logam Dasar	KBLI: 24
o. Industri Barang Logam bukan Mesin dan - Peralatannya	KBLI: 25
p. Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	KBLI: 26
q. Industri Peralatan Listrik	KBLI: 27
r. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk lainnya)	KBLI: 28
s. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	KBLI: 29
t. Industri Alat Angkut Lainnya	KBLI: 30
u. Industri Furnitur	KBLI: 31
v. Industri Pengolahan Lainnya	KBLI: 32
w. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan - Peralatannya	KBLI: 33

# ULASAN RINGKAS

<https://lacen.tbps.id>

## ULASAN RINGKAS

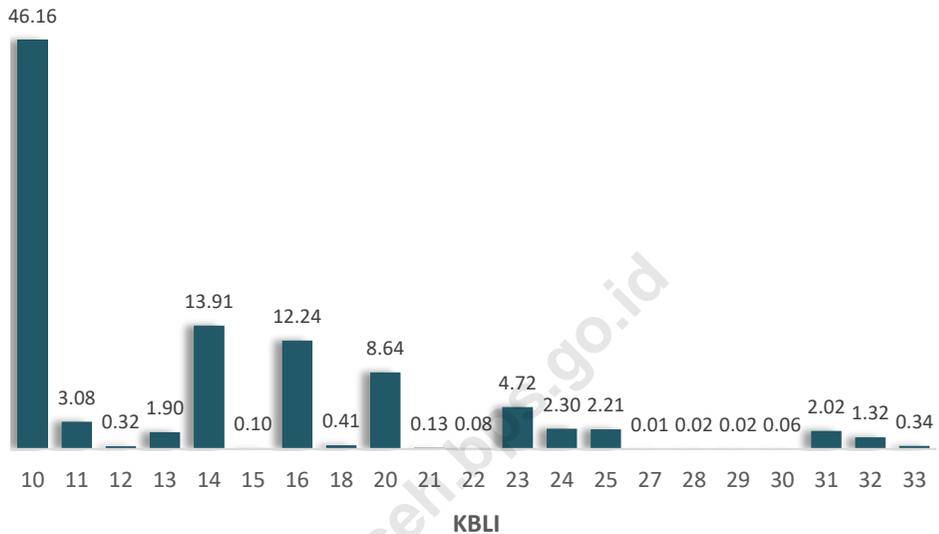
Pembangunan sektor industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan sektor industri dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2021 sumbangan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Aceh memang belum memperlihatkan kontribusi yang besar, namun demikian Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu bagian dari sektor industri pengolahan yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di suatu daerah. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan kegiatan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan dapat segera diatasi.

### A. Karakteristik Usaha IMK

Usaha Industri Mikro dan Kecil merupakan salah satu sektor usaha perekonomian rakyat yang menunjukkan perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil survei IMK tahunan 2021 jumlah usaha/perusahaan provinsi Aceh tercatat sebanyak 113,29 ribu usaha/perusahaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, persentase usaha industri ini meningkat sekitar 9,78 persen dari jumlah total usaha IMK.

Usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang dikategorikan sebagai Industri Mikro sedangkan usaha industri dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang dikategorikan sebagai Industri Kecil. Berdasarkan hasil Survei IMK Tahunan 2021 dapat dikatakan bahwa usaha industri mikro sangat mendominasi dibandingkan industri kecil dengan persentase mencapai 98,79 persen dari jumlah total usaha industri. Kondisi yang sama juga terjadi secara nasional dimana persentase usaha industri mikro mendominasi hingga 95,04 persen.

**Gambar 1.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2021**



Adapun 5 besar kegiatan usaha industri yang paling banyak dijalankan adalah kelompok Industri Makanan (KBLI 10) sejumlah 52 ribu usaha/perusahaan atau mencapai 46,16 persen dari jenis kbli lainnya, baik skala industri mikro dengan jumlah pekerja 1-4 orang maupun industri kecil dengan pekerja 5-19 orang. Urutan kedua terbanyak yaitu Industri Pakaian Jadi (KBLI 14) dengan jumlah hampir mencapai 14 ribu usaha/perusahaan atau sebesar 13,91 persen. Sementara industri dengan jenis kegiatan terbesar ketiga ditempati oleh kelompok Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) dengan jumlah 13 ribu usaha/perusahaan. Selanjutnya urutan keempat dan kelima yaitu Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dengan jumlah 9 ribu usaha/perusahaan atau sebesar 8,64 persen dan Industri Barang Galian Bukan Logam (KBLI 23) sebanyak 5 ribu usaha/perusahaan atau sebesar 4,72 persen.

## B. Karakteristik Tenaga Kerja dan Balas Jasa

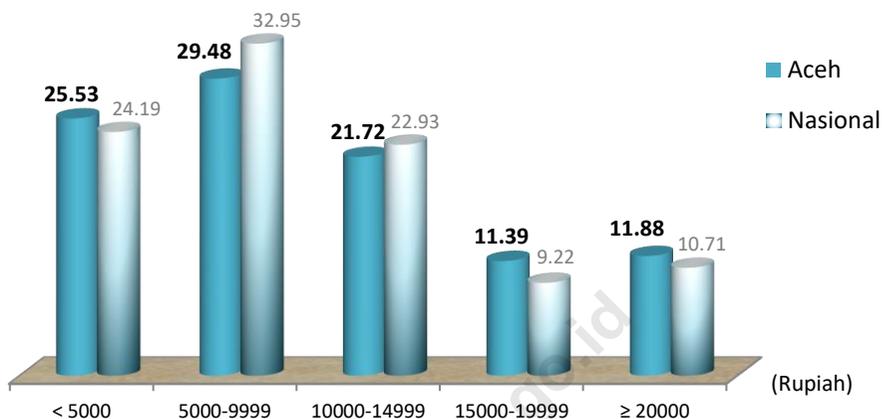
Sebagian besar tenaga kerja pada usaha Industri Mikro dan Kecil Tahun 2021 dilakukan oleh pekerja tidak dibayar (*unpaid workers*). Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, persentase tenaga kerja tidak dibayar lebih besar dari tenaga kerja dibayar yaitu lebih dari 71,92 persen dan selebihnya merupakan pekerja dibayar dari total tenaga kerja sebanyak 190 ribu orang. Begitu juga halnya dengan kondisi nasional, usaha IMK yang melibatkan pekerja dibayar persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan pekerja tidak dibayar. Dimana hanya sebanyak 32,84 persen pekerja dibayar, sedangkan selebihnya merupakan pemilik atau pekerja keluarga yang tidak dibayar.

**Tabel 1. Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja Tahun 2021**

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tenaga Kerja		
		Dibayar	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	113 292	53 505	137 009	190 514
%	2.48	28.08	71.92	100.00
Nasional	4 162 688	2 991 184	6 118 113	9 109 297
%	100	32.84	67.16	100.00

Penyerapan tenaga kerja IMK di Provinsi Aceh jika dibandingkan dengan angka nasional pada tahun 2021 adalah sebanyak 2,09 persen atau mencapai 190 ribu orang. Adapun penyerapan tenaga kerja ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari besarnya balas jasa pekerja memperlihatkan sebaran yang hampir sama antara usaha IMK di Aceh dan secara nasional. Persentase tertinggi adalah usaha dengan rata-rata upah pekerja lima ribu rupiah per jam hingga sepuluh ribu rupiah per jam (29,48 persen). Begitu pula persentase tertinggi untuk usaha IMK nasional berada pada nilai upah antara lima ribu hingga kurang dari sepuluh ribu rupiah per jam (32,95 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

**Gambar 2.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2021**



Jika dilihat dari jumlah hari kerja yang mendominasi adalah usaha dengan jumlah hari kerja 21 hingga 31 hari yaitu sebanyak 46,75 persen dengan rata-rata 7 jam kerja per hari. Begitu pula angka nasional sebagian besar usaha IMK berada pada rentang jumlah hari kerja maksimum dengan jam kerja rata-rata 7 jam per hari. Sedangkan usaha IMK dengan jumlah hari kerja 11-20 hari sebesar 38,38 persen dengan rata-rata jam sebanyak 6 jam per hari dan jumlah hari kerja 1-10 hari sebesar 14,88 persen dengan rata-rata jam kerja sebanyak 5 jam per hari.

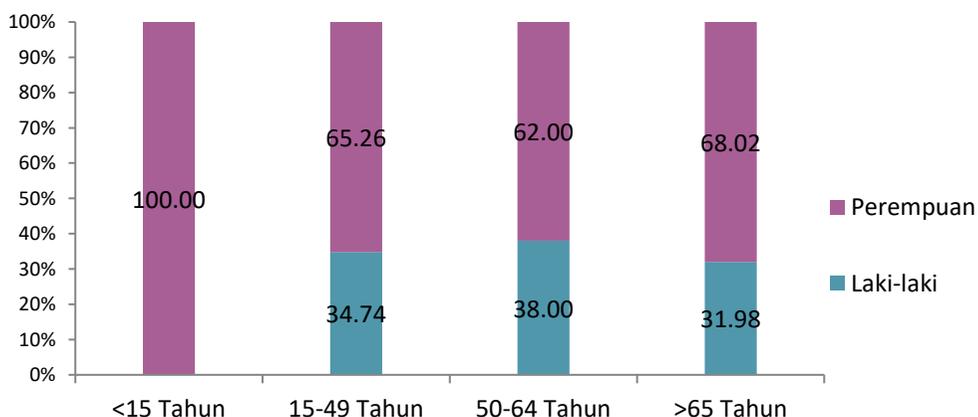
**Tabel 2. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2021**

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan					
	1-10		11-20		21-31	
	Banyaknya Usaha	Rata2 Jam Kerja/Hari	Banyaknya Usaha	Rata2 Jam Kerja/Hari	Banyaknya Usaha	Rata2 Jam Kerja/Hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	16 855	5	43 478	6	52 959	7
Nasional	556 824	6	1 121 132	6	2 484 732	7

Peran *gender* dalam usaha IMK sangatlah berpengaruh. Hal ini terlihat dari persentase pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Penyerapan pekerja perempuan mencapai 119 ribu orang (62,67 persen) sedangkan pekerja laki-laki sebanyak 71 ribu orang (37,33 persen). Bahkan pada kelompok umur 15 tahun ke bawah hanya didominasi oleh pekerja perempuan sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan IMK mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan karena dapat dilakukan sebagai kegiatan sampingan dari kesibukan mengurus rumah tangga. Khususnya pada kelompok Industri Makanan (KBLI 10), Industri Pakaian Jadi (KBLI 14), serta Industri Kayu, Barang dari Kayu Dan Anyaman Bambu/Rotan (KBLI 16). Sehingga dapat dikatakan bahwa Industri Mikro dan Kecil bukan hanya menjadi kegiatan usaha utama bagi laki-laki, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan baik untuk menopang ekonomi rumah tangga ataupun usaha sampingan untuk membantu menambah penghasilan.

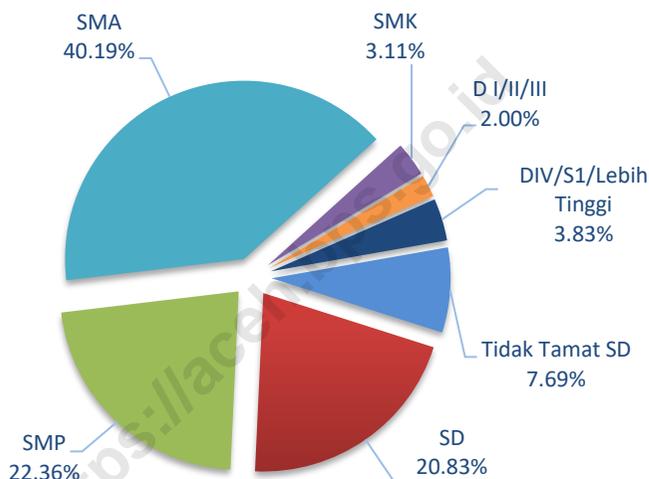
Dibandingkan dengan nasional, komposisi tenaganya berkebalikan dengan Aceh dimana persentase laki-laki sedikit lebih besar mencapai 52,80 persen dan pekerja perempuan sebesar 47,20 persen. Jika dilihat dari kelompok umur pekerja lebih dari 90 persen berada pada rentang usia produktif, yaitu berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun.

**Gambar 3.**  
**Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil**  
**menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021**



Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja sebagian besar merupakan tamatan SMA dengan persentase 40,19 persen. Kemudian disusul oleh pekerja lulusan SMP (22,36 persen), lulusan SD (20,83 persen) bahkan pekerja tidak tamat SD dengan persentase 7,69 persen. Sedangkan lulusan Sarjana atau lebih tinggi hanya sebesar 3,83 persen saja.

**Gambar 4.**  
**Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021**



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil adalah pekerja tidak dibayar. Terdapat perbedaan komposisi pekerja menurut jenis kelamin terhadap statusnya sebagai pekerja dibayar dan tidak dibayar. Untuk pekerja dibayar, jumlah laki-laki lebih dominan dari pada perempuan sebanyak 29 ribu orang pekerja laki-laki (15,43 persen) dan 24 ribu orang pekerja perempuan (12,65 persen). Sedangkan pekerja perempuan tidak dibayar jumlahnya jauh lebih besar yaitu 95 ribu orang (50,02 persen) sedangkan pekerja laki-laki tidak dibayar 41 ribu orang (21,90 persen).

Secara nasional persentase tenaga kerja dibayar sebanyak 32,84 persen dan selebihnya merupakan pekerja tidak dibayar. Pekerja tidak dibayar ini biasanya merupakan pengusaha itu sendiri atau pemilik maupun pekerja keluarga. Jumlah pekerja perempuan tidak dibayar lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki,

dengan persentase sebesar 36,74 persen. Sedangkan pekerja laki-laki lebih mendominasi pada usaha IMK dengan status pekerja dibayar baik di Aceh maupun skala nasional.

**Tabel 3. Persentase Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerja Tahun 2021**

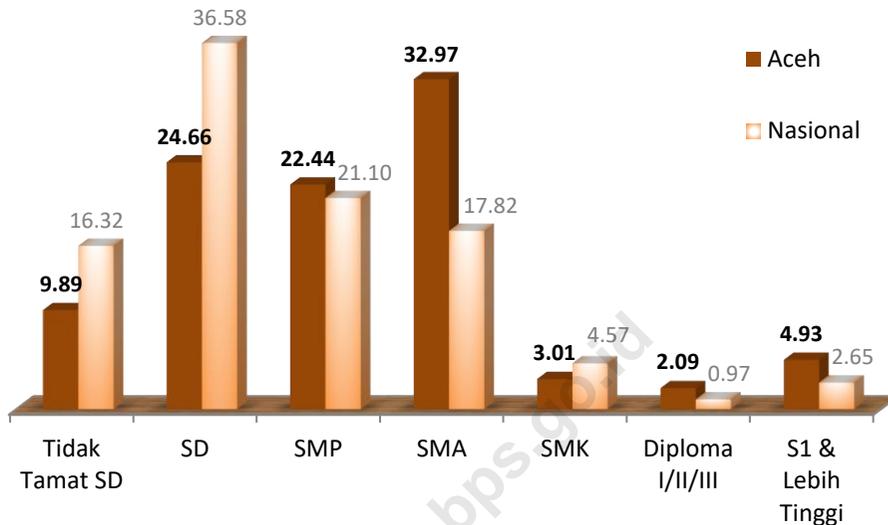
Provinsi	Jenis Kelamin	Pekerja Dibayar	Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	Laki-laki	15.43	21.90	37.33
	Perempuan	12.65	50.02	62.67
	<b>Jumlah</b>	<b>28.08</b>	<b>71.92</b>	<b>100.00</b>
Nasional	Laki-laki	22.38	30.42	52.80
	Perempuan	10.46	36.74	47.20
	<b>Jumlah</b>	<b>32.84</b>	<b>67.16</b>	<b>100.00</b>

### C. Karakteristik Pengusaha IMK

Pendidikan merupakan salah satu peran dasar dalam menunjang produktivitas tenaga kerja. Secara umum berdasarkan hasil survei IMK tahun 2021 sebagian besar pengusaha merupakan tamatan SD kebawah. Akan tetapi mereka yang lulusan SMA juga tidak kalah bersaing dalam industri ini. Hal ini menunjukkan bahwa usaha IMK semakin diminati oleh bermacam kalangan tidak hanya mereka yang berpendidikan rendah. Sebanyak 34,55 persen usaha industri yang pengusahanya lulusan SD ke bawah dan menyusul persentase kedua terbesar pendidikan SMA sebesar 32,97 persen. Kemudian Pendidikan SMP sederajat juga cukup tinggi sebesar 22,44 persen. Pada kondisi nasional usaha IMK dengan pendidikan yang ditamatkan pengusaha juga didominasi oleh lulusan SD ke bawah dengan persentase 52,90 persen. Sedangkan tamatan SMA/SMK persentasenya sebesar 17,82 persen.

Adapun pendidikan yang ditamatkan pengusaha pada tingkat Sarjana (S1 dan lebih tinggi) hanya sebesar 4,93 persen. Angka ini justru menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan angka nasional persentasenya lebih rendah yaitu hanya 2,65 persen.

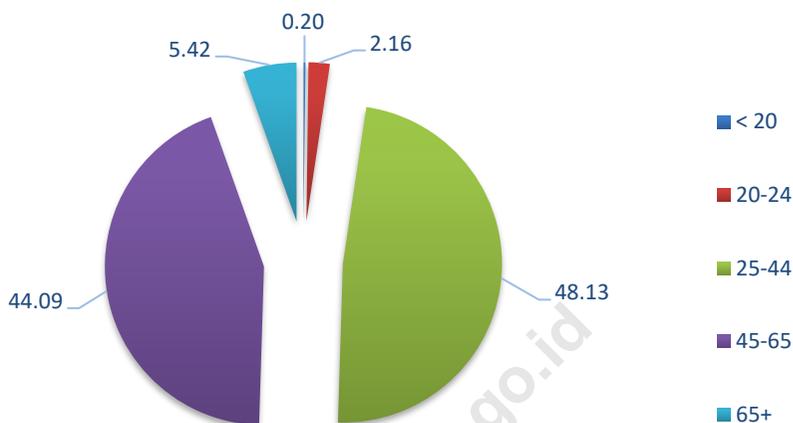
**Gambar 5.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2021**



Usaha IMK juga didominasi oleh pengusaha dengan kelompok umur produktif yaitu 25-64 tahun. Ini merupakan suatu kewajaran bila pada jenjang usia tersebut mengharuskan seseorang mempunyai penghasilan karena sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Umur 64 tahun dianggap umur maksimal dapat melakukan usaha, karena terkendala banyak hal diantaranya faktor kesehatan, kemampuan dalam mengingat dan sebagainya. Namun demikian masih ada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pada umur 65 tahun ke atas, meskipun persentasenya cukup kecil.

Berdasarkan kelompok umur pengusaha, sebagian besar usaha mikro kecil pengusahanya berada pada kelompok umur 25-64 tahun sebanyak 92,21 persen. Pengusaha lansia berusia 65 tahun ke atas juga turut mengambil andil dalam usaha industri ini sebesar 5,42 persen. Persentase terkecil adalah usaha dengan kelompok umur di bawah 25 tahun yaitu 2,36 persen. Selain itu angka nasional juga mencatat persentase usaha pada kelompok umur pengusaha 25-64 tahun turut pula mendominasi sebesar 90,32 persen. Pengusaha dengan kelompok umur dibawah 25 tahun persentasenya hanya 1,53 persen.

**Gambar 6.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2021**

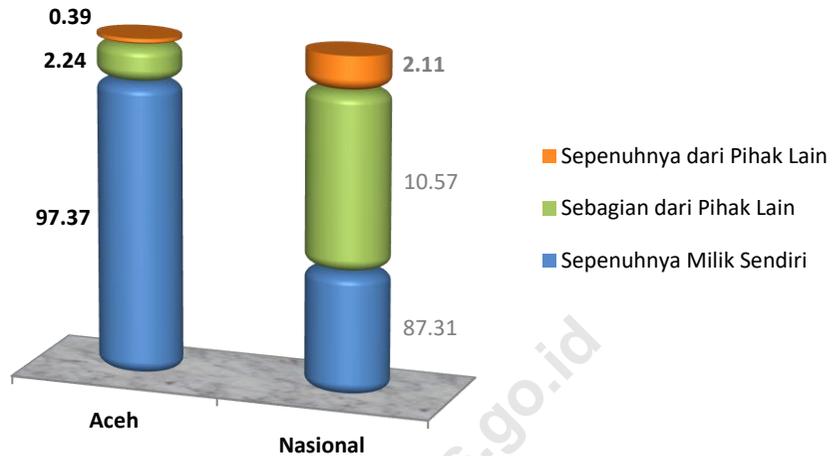


#### D. Karakteristik Kendala dan Pemasaran

Hal penting dalam melakukan kegiatan usaha adalah bagaimana pelaku usaha menyikapi masalah kendala usaha dan menciptakan prospek peluang usaha ke depan. Beberapa variabel yang dikumpulkan dalam survei IMK 2021 antara lain; sumber permodalan, kesulitan utama dalam menjalankan usaha, keikutsertaan dalam koperasi, kemitraan usaha, serta pemasaran hasil produksi.

Modal merupakan hal yang utama dipertimbangkan oleh para pengusaha. Sumber modal bisa berasal dari milik sendiri, patungan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usaha IMK, modal yang dibutuhkan bukan hanya uang dalam nominal besar, akan tetapi modal uang seadanya, peralatan yang mendukung kegiatan usaha, serta tempat usaha yang masih bercampur dengan rumah tangga bisa menjadi pertimbangan. Ditinjau dari sumber modal (Gambar 6), terlihat bahwa usaha IMK sebagian besar sumber modalnya adalah milik sendiri dengan persentase lebih dari 95 persen dan dari pihak lain sebesar 2,63 persen. Cakupan secara nasional juga memperlihatkan angka cukup tinggi pada persentase usaha dengan sumber modal milik sendiri yaitu 87,31 persen dan selebihnya menggunakan modal dari pihak lain baik sebagian maupun sepenuhnya.

**Gambar 7.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal**  
**Tahun 2021**



Meskipun banyak usaha IMK yang menggunakan sumber modal milik sendiri, akan tetapi sebagian pengusaha juga tetap melakukan pinjaman modal demi kelancaran dan meningkatkan usahanya. Ada beberapa sumber yang dijadikan tempat peminjaman utama oleh pengusaha untuk permodalannya, antara lain; bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, perorangan, pinjaman program pemerintah serta pinjaman lembaga swasta.

Terlihat dari hasil survei bahwa sumber modal dari pihak lain yang paling dominan adalah pinjaman perorangan mencapai 48,94 persen. Pinjaman ini tentu saja lebih mudah diperoleh tanpa syarat apapun dan lebih praktis. Hal ini berkebalikan dari tahun sebelumnya dimana pinjaman perorangan menempati urutan terendah dikarenakan berbagai alasan oleh pengusaha. Selain itu pada tahun 2021 pinjaman bank menduduki persentase kedua tertinggi setelah pinjaman perorangan yaitu sebesar 36,96 persen. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari perubahan sistem transaksi keuangan di Aceh yang mengikuti ketentuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada seluruh lembaga keuangan termasuk bank. Berdasarkan prinsip syariah tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi pengusaha yang mengambil pinjaman, karena resiko yang lebih minim, tanpa bunga dan biaya administrasi, serta lebih sesuai dengan syariat islam.

Pinjaman lembaga keuangan lain hanya memberikan sedikit andil dalam permodalan usaha IMK. Baik pinjaman dari koperasi maupun lembaga keuangan bukan bank kurang diminati dengan persentase kurang dari sepuluh persen saja. Sedangkan pinjaman modal pada program pemerintah dan pinjaman lembaga swasta oleh sebagian pengusaha menduduki persentase yang paling kecil hanya 1,71 persen.

**Gambar 8.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama**  
**Tahun 2021**



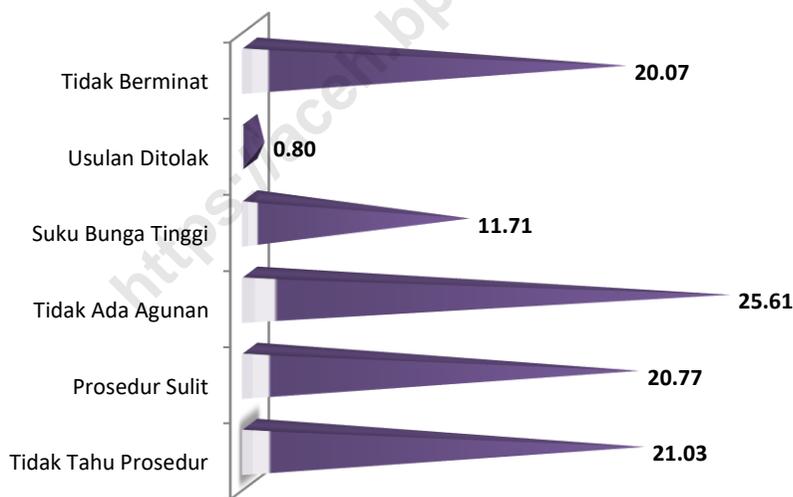
Dengan demikian fakta bahwa pinjaman program pemerintah untuk pengusaha mikro kecil sangat minim sekali. Hanya sekitar 0,94 persen pengusaha yang mengambil program pemerintah dari total hampir tiga ribu pengusaha untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Hal ini tentu saja menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pengusaha kecil dengan menyediakan program-program bantuan kewirausahaan.

Sementara itu sebagian pengusaha yang tidak mengambil pinjaman dari bank dikarenakan beberapa faktor tertentu. Alasan tidak ada agunan menunjukkan angka paling tinggi dibandingkan alasan lainnya dengan persentase sebesar 25,61 persen. Kemudian disusul dengan alasan lain diantaranya tidak tahu prosedur (21,03 persen), prosedur sulit (20,77 persen), tidak berminat (20,07 persen). Sedangkan lebih dari 10 persen menyebutkan faktor suku bunga tinggi, dan hanya sekitar 0,76

persen yang usulannya ditolak oleh pihak bank dalam mengambil pinjaman. Demikian halnya angka nasional persentase cukup tinggi untuk pengusaha yang tidak berminat meminjam dari bank yaitu sebanyak 41,34 persen.

Besarnya pinjaman bank oleh pengusaha bervariasi antara dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Jumlah pinjaman terbanyak berada pada interval 20 hingga 100 juta rupiah yang mencapai 62,94 persen. Pinjaman kurang dari 20 juta menempati posisi kedua dengan persentase sebesar 32,88 persen. Sedangkan sisanya melakukan pinjaman di atas 100 juta rupiah sebanyak 3,91 persen bahkan sampai dengan nominal 500 juta ke atas walau hanya sebesar 0,27 persen saja.

**Gambar 9.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2021**



Pada kegiatan usaha Industri Mikro dan Kecil terdapat kendala atau kesulitan dalam menjalankan usaha, baik dari segi permodalan, penyediaan bahan baku, pemasaran, persaingan dalam usaha, tenaga kerja bahkan cuaca dan lainnya. Total sebanyak 85,45 persen mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana persentase yang mengalami kesulitan dibawah 70 persen.

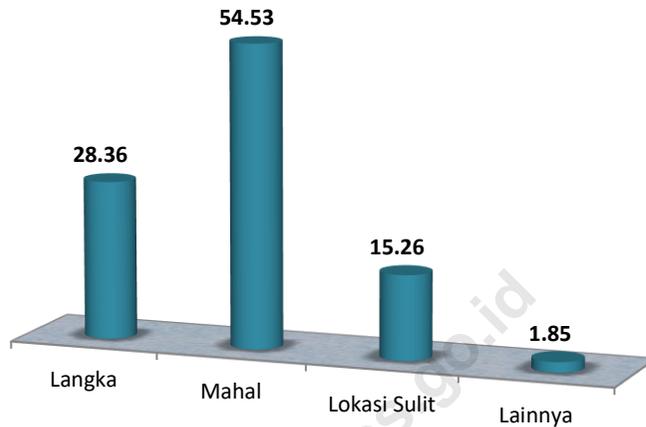
**Tabel 4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2021**

Jenis Kesulitan Utama	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Bahan Baku	16.80	16.62
Permodalan	40.11	34.34
Pemasaran	22.91	26.09
BBM/Energi	6.70	4.13
Infrastruktur	4.22	3.37
Tenaga Kerja	1.08	2.79
Cuaca	7.35	10.03
Lainnya	0.84	2.62
<b>Mengalami Kesulitan</b>	<b>85.45</b>	<b>81.95</b>
<b>Tidak Mengalami Kesulitan</b>	<b>14.55</b>	<b>18.05</b>

Kesulitan utama yang paling banyak dihadapi oleh pengusaha IMK adalah masalah permodalan. Hal ini mencerminkan bahwa usaha yang dijalankan dengan modal seadanya akan membuat usaha tersebut tidak bisa berkembang dengan maksimal. Sebanyak 40,11 persen usaha/perusahaan mengalami kendala dalam hal permodalan. Disusul oleh kesulitan dalam hal pemasaran sebesar 22,91 persen serta kendala bahan baku 16,80 persen. Sedangkan kesulitan lain seperti masalah BBM/energi, infrastruktur, tenaga kerja, cuaca dan lainnya persentasenya cukup kecil yaitu dibawah sepuluh persen.

Ditinjau dari skala nasional masalah permodalan juga menjadi kendala utama dalam kegiatan usaha dengan persentase 34,34 persen. Selain itu pemasaran dan bahan baku juga menjadi kesulitan utama yang harus dihadapi oleh pengusaha yang cukup mempengaruhi proses usaha industri.

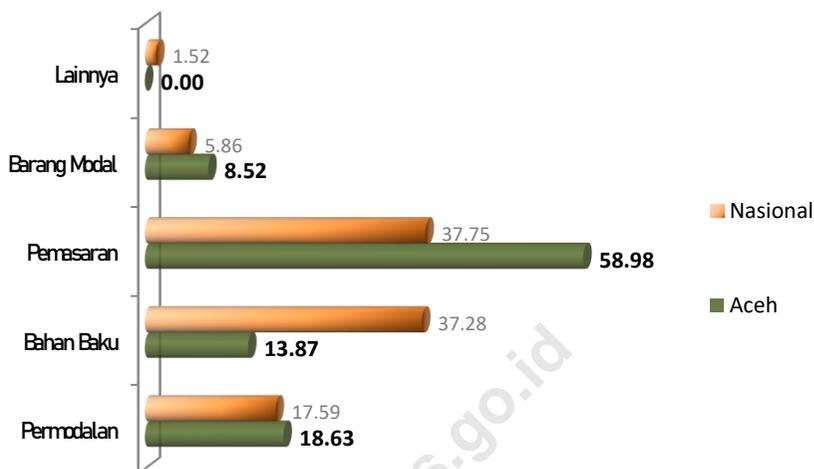
**Gambar 10.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2021**



Secara garis besar sebanyak 16,80 persen pengusaha IMK mengalami kesulitan utama bahan baku. Kesulitan bahan baku ini terutama dikarenakan oleh harga bahan baku mahal, kelangkaan bahan baku, lokasi memperoleh bahan baku yang sulit atau jauh dan lainnya. Kebanyakan pengusaha mengeluhkan makin melonjaknya harga kebutuhan di pasaran khususnya bahan baku untuk menunjang kegiatan usaha mereka. Sebanyak 54,53 persen pengusaha merasakan harga bahan baku yang semakin mahal serta 28,36 persen mengalami kesulitan akibat kelangkaan bahan baku. Kelangkaan bahan baku artinya ketersediaan bahan baku utama jarang didapat, sulit ditemukan atau bahkan terkadang tidak ada. Selain itu, kesulitan bahan baku lainnya dikarenakan lokasi yang sulit sebesar 15,26 persen.

Terlihat bahwa sebagian besar pengusaha yang menyatakan mahalnya bahan baku adalah usaha IMK pada kelompok industri makanan (KBLI 10). Tentu saja ini berkaitan dengan semakin melonjaknya kebutuhan makanan pokok seiring berkembangnya waktu. Adapun yang menyatakan kesulitan bahan baku karena langka dan lokasi jauh adalah kelompok industri kerajinan kayu atau bahan-bahan dari kayu, anyaman dari bambu dan rotan maupun rumbia. Hal ini dapat menjadi masalah karena berdampak pada kenaikan harga produksi sehingga akan menjadi masalah baru dalam hal persaingan dengan usaha lainnya.

**Gambar 11.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain**  
**menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2021**



Untuk mengembangkan perusahaan diperlukan kemitraan dengan usaha lain. Kemitraan dapat berupa kerjasama dalam permodalan, penyediaan bahan baku atau pemasaran. Tahun 2021 persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain masih sedikit yaitu hanya 6,70 persen. Akan tetapi angka ini jauh membaik dibandingkan tahun sebelumnya hanya 0,48 persen. Beberapa usaha yang menjalin kemitraan terutama dalam hal pemasaran menduduki peringkat teratas yakni sebesar 58,98 persen. Kemitraan dalam hal permodalan dan bahan baku menduduki urutan setelahnya. Sedangkan dalam hal barang modal persentasenya kurang dari sepuluh persen saja.

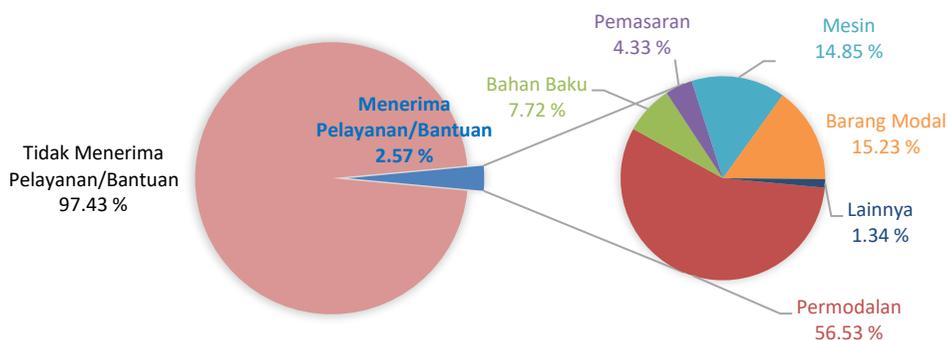
Begitu juga kondisi nasional persentase usaha IMK yang menjalin kemitraan dengan usaha lain meningkat menjadi 9,72 persen sedangkan sisanya tidak pernah menjalin kemitraan. Jenis kemitraan yang diterima terutama juga dalam hal pemasaran dan bahan baku. Adapun sebagian usaha yang menjalin kemitraan ini, didukung oleh beberapa badan/lembaga pemerintah, swasta dan lainnya. Sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Tahun 2021**

Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Pemerintah Daerah	2.54	2.67
BUMN/BUMD	9.77	1.27
Swasta	9.69	34.82
Perbankan	3.50	6.02
Yayasan/LSM	0.46	1.26
Koperasi	4.68	3.88
Lainnya	69.34	50.08
<b>Menjalinkan Kemitraan</b>	<b>6.70</b>	<b>9.72</b>
<b>Tidak Menjalinkan Kemitraan</b>	<b>93.30</b>	<b>99.28</b>

Pada tahun 2021 badan atau lembaga yang berperan besar dalam hal kemitraan dengan usaha IMK adalah lembaga lainnya atau perorangan. Hal ini sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana BUMN/BUMD lebih berperan. Adapun peran pemerintah daerah sangat kecil bahkan tidak menyentuh angka lima persen. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan para pengusaha untuk mulai meningkatkan hubungan kemitraan sehingga dapat memberikan solusi maupun meringankan kesulitan para pelaku usaha. Adapun lembaga lain yang andil memberikan dalam kemitraan usaha IMK yaitu BUMN/BUMD sebesar 9,77 persen, disusul perusahaan swasta sebesar 9,69 persen. Sedangkan koperasi, perbankan dan yayasan/LSM hanya memiliki sedikit andil dalam kemitraan usaha IMK ini.

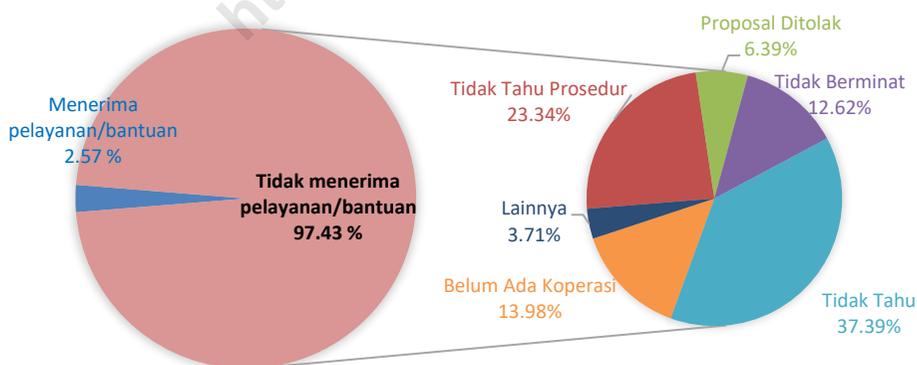
**Gambar 12.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan/Bantuan yang Diterima dari Koperasi Tahun 2021**



Meskipun hanya beberapa usaha mikro dan kecil yang menjalin kemitraan dengan koperasi, nyatanya terdapat sekitar 1,90 ribu pengusaha yang mendapat pelayanan/bantuan permodalan dari koperasi sedangkan beberapa lainnya mendapat pelayanan barang modal/peralatan, mesin, bahan baku, pemasaran dan lainnya. Selain itu pengusaha juga mendapat bimbingan/pelatihan/penyuluhan dari pemerintah maupun lembaga swasta. Akan tetapi hanya 2,05 persen pengusaha yang mengikuti bimbingan/pelatihan/penyuluhan baik tentang manajerial, ketrampilan dan tehnik produksi maupun pemasaran. Sedangkan sisanya belum pernah mengikuti kegiatan sejenis itu.

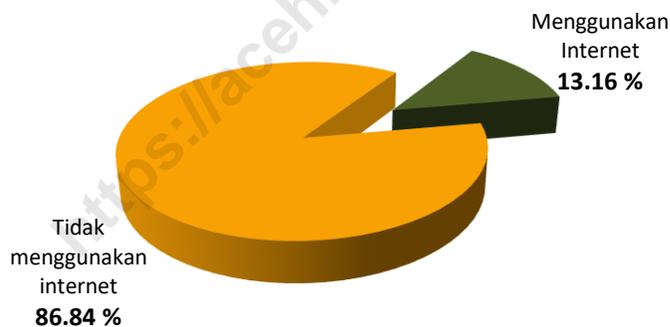
Hal ini sangat disayangkan karena sebagian pengusaha hanya bermodalkan pengalaman seadanya atau bahkan menjalankan usaha tanpa ketrampilan dibidangnya. Tentu saja ini sedikitnya berpengaruh terhadap hasil barang yang diproduksi. Peran pemerintah harusnya bisa memfasilitasi lebih banyak kegiatan sejenis bimbingan/penyuluhan kepada pelaku usaha agar lebih maju baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam menghasilkan barang produksinya.

**Gambar 13.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi Tahun 2021**



Ketidaktahuan pengusaha akan bantuan dari badan/lembaga pemerintah maupun swasta umumnya dikarenakan terbatasnya informasi yang mereka peroleh. Minimnya pemanfaatan internet untuk melakukan akses konektivitas menjadi salah satu penyebab para pengusaha tidak mengetahui peluang tersedianya sarana kemitraan ataupun bantuan yang ditawarkan beberapa pihak. Di masa sekarang ini banyak pebisnis atau pengusaha besar yang memanfaatkan bantuan internet untuk memperoleh dan berbagi informasi apapun demi menunjang aktivitas usahanya. Namun demikian pada pelaku usaha IMK ternyata masih sangat minim dalam penggunaan internet baik dalam hal promosi/iklan penjualan, pemasaran produk, pembelian bahan baku, pencarian informasi maupun kegiatan operasional lain yang dapat dilakukan secara *online*.

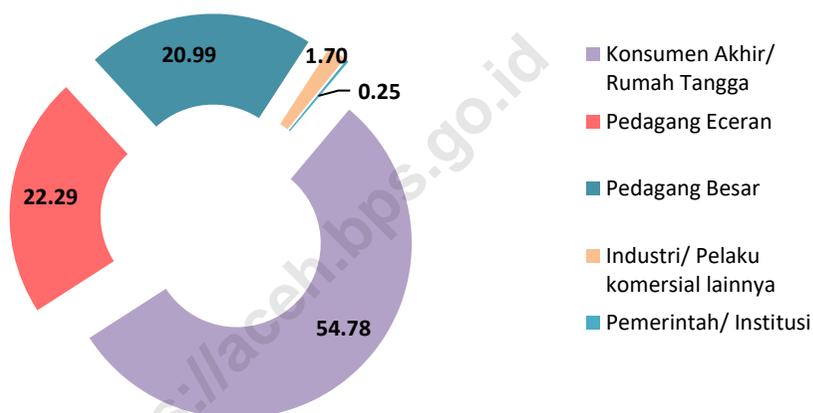
**Gambar 14.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Penggunaan Internet**  
**Tahun 2021**



Salah satu faktor penting yang mendukung kemajuan suatu usaha industri adalah menentukan lokasi pemasaran yang tepat. Pemilihan lokasi pemasaran yang kurang tepat akan menghambat kelancaran usaha industri itu sendiri. Dengan jalinan kemitraan yang cukup terbatas, maka ruang lingkup pemasaran hasil produksi cenderung sempit. Untuk wilayah Aceh, lokasi pemasaran yang menjadi sasaran terbanyak adalah dalam satu kabupaten/kota yang mencapai 89,21 persen, kemudian luar kabupaten/kota satu provinsi sebanyak 9,97 persen. Sedangkan sisanya dipasarkan ke luar provinsi dan luar negeri dengan persentase masing-masing 0,78 persen dan 0,03 persen.

Produk yang dihasilkan dari usaha industri mikro dan kecil dipasarkan ke berbagai kalangan. Konsumen utama yang mendominasi hasil olahannya adalah rumah tangga dan pedagang sebagaimana terlihat pada gambar 14. Selain itu pelaku industri dan komersial lain serta pemerintah juga menjadi konsumen dalam pemanfaatan hasil olahan industri walau persentasenya kurang dari dua persen.

**Gambar 15.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Konsumen Utama**  
**Tahun 2021**



Sejak merebaknya virus Covid-19 di awal tahun 2020 lalu, banyak usaha khususnya berskala mikro dan kecil mengalami penurunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh pembatasan mobilitas yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan *lockdown* di sebagian besar wilayah sehingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat terlebih pelaku usaha ekonomi. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 61,12 persen pengusaha masih merasakan dampak pandemi Covid-19 baik dari faktor penurunan penjualan, kenaikan harga bahan baku dan lainnya.

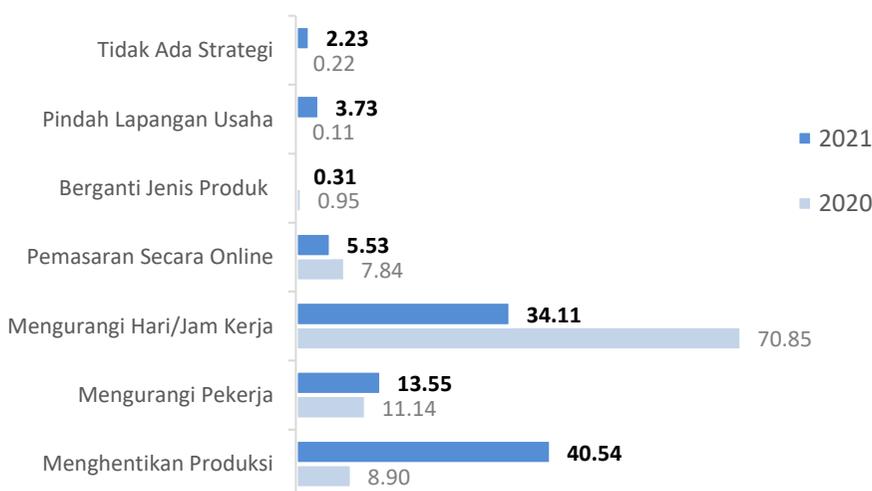
Dampak yang dirasakan oleh sebagian besar pengusaha yaitu penurunan penjualan atau berkurangnya permintaan pasar dengan persentase lebih dari 50 persen. Sedangkan selebihnya mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan bahan baku, masalah pekerja maupun penundaan pembayaran. Dengan adanya kendala seperti ini para pengusaha merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya dan dibutuhkan strategi lain untuk menghadapinya. Adapun sebagian besar pemilik usaha mengurangi hari maupun jam kerja selama pandemi, tentu saja hal ini

mengakibatkan penurunan omset usaha. Strategi selanjutnya yaitu mengurangi jumlah pekerja, beralih usaha bahkan sampai harus menghentikan produksi.

**Tabel 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Terdampak Pandemi dan Dampak yang Dirasakan Tahun 2021**

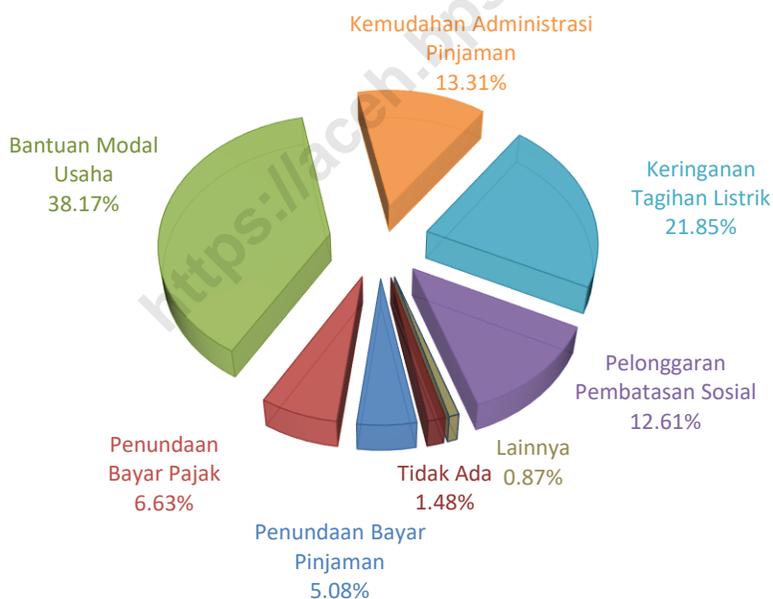
Dampak yang Dirasakan	Aceh	Nasional
(1)	(2)	(3)
Permintaan/Penjualan Menurun	52.21	50.55
Penundaan Pembayaran Pembeli	11.93	15.05
Bahan Baku Langka	7.43	8.59
Bahan Baku Mahal	25.98	20.07
Kehadiran Pekerja Berkurang	1.82	3.08
Lainnya	0.63	2.66
<b>Terdampak Pandemi</b>	<b>61.12</b>	<b>73.19</b>
<b>Tidak Terdampak Pandemi</b>	<b>38.88</b>	<b>26.81</b>

**Gambar 16.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Strategi Menghadapi Dampak Pandemi Tahun 2021**



Selain beberapa strategi yang dijalankan, pengusaha IMK juga berharap ada bantuan maupun kebijakan dari pihak-pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang dirasakan. Kebutuhan yang paling utama diantaranya bantuan modal usaha, keringanan dalam pembiayaan seperti tagihan listrik, kemudahan administrasi pinjaman, kelonggaran pembatasan sosial dan lainnya. Bukan hal yang tidak mungkin jika usaha IMK akan berakhir gulung tikar jika tidak ada perubahan operasi dan bantuan dari pemerintah. Bahkan para pengusaha sendiri tidak tahu bagaimana kelangsungan usahanya apakah dapat bertahan lebih dari tiga bulan, antara 1 hingga 3 bulan atau bisa kurang dari satu bulan.

**Gambar 17.**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Bantuan atau Kebijakan yang Dibutuhkan Tahun 2021**



# LAMPIRAN TABEL

<https://aceh.upe.id>

**Tabel 1** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Pekerja di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 1** *Number of Micro and Small Scale Establishment by Group of Workers in Aceh Province 2021*

Provinsi Province	Kelompok Pekerja Group of Workers					Jumlah Total
	1	2-4	5-9	10-14	15-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	63 820	48 100	1 082	290	0	113 292
Indonesia	1 769 078	2 187 005	129 072	56 708	20 825	4 162 688

**Tabel 2** Banyaknya Usaha, Pekerja, Pendapatan, Pengeluaran, dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 2** *Number of Establishment, Workers, Revenue, Expenditure, and Compensation of Workers of Micro and Small Scale Establishment in Aceh Province 2021*

Provinsi Province	Banyak- nya Usaha Number of Establish- ment	Pekerja Workers			Pendapatan Revenue (000 Rp)	Pengeluaran Expenditure (000 Rp)	Balas Jasa Pekerja Compensation of Workers (000 Rp)
		Dibayar Paid	Tidak Dibayar Unpaid	Jumlah Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	113 292	53 505	137 009	190 514	10 820 103 440	6 171 858 647	1 016 628 334
Indonesia	4 162 688	2 991 184	6 118 113	9 109 297	501 825 494 138	293 490 955 525	52 659 060 276

**Tabel 3** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari dan Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 3** *Number of Micro and Small Scale Establishment and Average of Working Hour a Day by Working Day a Month in Aceh Province 2021*

Provinsi Province	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan / Working Day a Month						Jumlah / Total	
	1 - 10		11 - 20		21 - 31		Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day
	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Rata-rata Jam Kerja per Hari Average of Working Hour a Day		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	16 855	5	43 478	6	52 959	7	113 292	6
Indonesia	556 824	6	1 121 132	6	2 484 732	7	4 162 688	7

**Tabel** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2021

**Table 4** *Number of Micro and Small Scale Establishment by Level of Educational Attainment of Entrepreneurs in Aceh Province 2021*

Provinsi Province	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Level of Educational Attainment of Entrepreneurs							Jumlah Total
	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD dan Sederajat Elementary School	SMP dan Sederajat Junior High School	SMA/MA/ Paket C Senior High School	SMK Vocational High School	Diploma I/II/ III Diploma I/II/ III	Diploma IV/Sarjana (S1) dan Lebih Tinggi University Degree	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	11 206	27 941	25 426	37 355	3 410	2 372	5 582	113 292
Indonesia	679 159	1 522 915	878 224	741 633	190 038	40 437	110 282	4 162 688

**Tabel**            **Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kelompok Umur Pengusaha di Provinsi Aceh Tahun 2021**

**Table**    **5**    **Number of Micro and Small Scale Establishment by Age Group of Entrepreneurs in Aceh Province 2021**

Provinsi Province	Kelompok Umur Pengusaha Age Group of Entrepreneurs					Jumlah Total
	< 20	20 - 24	25 - 44	45-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
Aceh	231	2 447	54 523	49 948	6 143	113 292
Indonesia	9 565	53 979	1 636 800	2 122 969	339 375	4 162 688

**Tabel**            **Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Aceh Tahun 2021**

**Table**    **6**    **Number of Micro and Small Scale Establishments by Level of Educational Attainment of Workers in Aceh Province 2021**

Provinsi Province	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pekerja / Level of Educational Attainment of Workers							Jumlah Total
	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	SMK	DI/II/III	Diploma IV/ Sarjana/Lebih Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	14 651	39 683	42 596	76 561	5 926	3 805	7 292	190 514
Indonesia	1 260 955	3 349 479	2 189 847	1 721 624	360 438	62 061	164 893	9 109 297

**Tabel 7** Banyaknya Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 7** *Number of Workers of Micro and Small Scale Establishments by Workers Status and Sex in Aceh Province 2021*

Provinsi <i>Province</i>	Pekerja Dibayar / <i>Paid Worker</i>			Pekerja Tidak Dibayar / <i>Unpaid Worker</i>			Jumlah / <i>Total</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Sub Jumlah Sub Total	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Sub Jumlah Sub Total	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	29 400	24 105	53 505	41 721	95 288	137 009	71 121	119 393	190 514
Indonesia	2 038 304	952 880	2 991 184	2 771 462	3 346 651	6 118 113	4 809 766	4 299 531	9 109 297

**Tabel 8** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besarnya Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 8** *Number of Micro and Small Scale Establishments by Compensation of Paid Worker per Hour in Aceh Province 2021*

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar <i>Number of Establishment with Paid Worker</i>	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Jam (Rupiah) <i>Compensation of Paid Worker per Hour (Rupiahs)</i>				
			< 5000	5000-9999	10000-14999	15000-19999	> 20000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	113 292	26 920	6 872	7 936	5 848	3 066	3 198
Indonesia	4 162 688	1 141 452	276 078	376 120	261 689	105 277	122 288

**Tabel** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Besaran Pendapatan Setahun di Provinsi Aceh Tahun 2021

**Table 9** *Number of Micro and Small Scale Establishments by Revenue Value on a Year in Aceh Province 2021*

Provinsi <i>Province</i>	Besaran Pendapatan Setahun ( Jutaan Rupiah ) <i>Revenue Value on a Year ( Millions Rupiahs )</i>									Jumlah <i>Total</i>
	< 5	5 - 9	10-24	25-49	50-99	100-999	1000-1999	2000-15000	≥ 15000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	7 920	15 688	24 517	26 552	18 132	19 634	526	255	68	113 292
Indonesia	430 729	490 419	932 336	773 692	632 941	833 729	44 811	22 794	1 237	4 162 688

**Tabel** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal di Provinsi Aceh Tahun 2021

**Table 10** *Number of Micro and Small Scale Establishments by Source of Capital in Aceh Province 2021*

Provinsi <i>Province</i>	Sumber Modal <i>Source of Capital</i>			Jumlah <i>Total</i>
	Sepenuhnya Milik Sendiri <i>Fully Owned</i>	Sebahagian dari Pihak Lain <i>Partially from Others</i>	Sepenuhnya dari Pihak Lain <i>Fully from Others</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	110 313	2 538	441	113 292
Indonesia	3 634 635	440 204	87 849	4 162 688

**Tabel 11** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Sumber Modal Utama di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 11** *Number of Micro and Small Scale Establishments by Source of Main Loan in Aceh Province 2021*

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Sumber Modal Source of Capital		Sumber Modal Utama The Main Source of Capital					
		Sepenuhnya Milik Sendiri Fully Owned	Sebagian atau Sepenuhnya Pihak Lain Others	Bank Bank	Koperasi Coopera- tive	Lembaga Keuangan bukan Bank Non-Bank Financial Institution	Perorangan Individual	Pinjaman Program Pemerintah Government Program Loans	Pinjaman Lembaga Swasta Private Institutio n Loan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	113 292	110 313	2 979	1 101	240	129	1 458	28	23
Indonesia	4 162 688	3 634 635	528 053	240 787	38 847	15 201	194 888	28 641	9 689

**Tabel 12** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 12** *Number of Micro and Small Scale Establishments by Main Reason for Not Having Bank Loan in Aceh Province 2021*

Provinsi Province	Banyaknya Usaha yang Memanfaat- kan Pinjaman Number of Establishment Having Loans	Meminjam dari Bank Having Bank Loans	Tidak Meminjam dari Bank Not Having Bank Loans	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Main Reason for Not Having Bank Loan					
				Tidak Tahu Caranya Not Knowing Procedure	Persyaratan Sulit Difficulty in Procedure	Tidak Ada Agunan Not Having Collateral	Suku Bunga Tinggi High Interest Rate	Usulan Ditolak Proposal Rejected	Tidak Berminat Not Interested
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2 979	1 101	1 878	395	390	481	220	15	377
Indonesia	528 053	241 536	286 517	20 818	35 107	79 652	29 950	2 541	118 449

**Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2021**

**Table 13 Number of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulties in Aceh Province 2021**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Mengalami Kesulitan Not Having Difficulties	Mengalami Kesulitan Having Difficulties	Jenis Kesulitan Types of Difficulties							
				Bahan Baku Raw Materials	Pemodal Capital	Pemasaran Marketing	BBM/ Energi Fuel/ Energy	Infrastru ktur Infrastructure	Tenaga Kerja Labour	Cuaca Weather	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	113 292	16 484	96 808	31 892	76 157	43 501	12 717	8 004	2 057	13 947	1 593
Indonesia	4 162 688	751 158	3 411 530	1 052 663	2 175 686	1 653 218	261 886	213 498	176 831	635 629	165 989

**Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku di Provinsi Aceh Tahun 2021**

**Table 14 Number of Micro and Small Scale Establishments by Kind of Main Difficulty of Raw Material in Aceh Province 2021**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Mengalami Kesulitan Not Having Difficulties	Mengalami Kesulitan Having Difficulties		Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Types of Main Difficulty of Raw Material			
			Selain Bahan Baku Except Raw Material	Bahan Baku Raw Material	Langka Scarcity	Mahal Expensive	Lokasi Sulit Difficult Location	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	113 292	16 484	64 916	31 892	9 043	17 391	4 867	591
Indonesia	4 162 688	751 158	2 358 867	1 052 663	357 327	572 356	80 380	42 600

**Tabel 15** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain menurut Jenis Kemitraan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2021

**Table 15** *Number of Micro and Small Scale Establishments Having Partnership by Regency/Municipality and Types of Partnership Received in Aceh Province 2021*

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Menjalinkan Kemitraan Not Having Partnership	Menjalinkan Kemitraan Having Partnership	Jenis Kemitraan yang Diterima Types of Partnership Received				
				Permodalan Capital	Bahan Baku Raw Materials	Pemasaran Marketing	Barang Modal Capital goods	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	113 292	105 696	7 596	1 746	1 300	5 526	798	-
Indonesia	4 162 688	3 757 907	404 781	102 238	216 717	219 461	34 066	8 863

**Tabel 16** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan di Provinsi Aceh Tahun 2021

**Table 16** *Number of Micro and Small Scale Establishments by Organizer of Business Partnership in Aceh Province 2021*

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Tidak Menjalinkan Kemitraan Not Having Partnership	Menjalinkan Kemitraan Having Partnership	Badan/Lembaga yang Menjalinkan Kemitraan Organizer of Business Partnership						
				Pemerintah daerah /Dinas/Kop erasi Local government	BUMN/ BUMD	Swasta Private	Perbankan Bank	Yayasan/ LSM Foundation/ NGO	Koperasi Cooperative	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Aceh	113 292	105 696	7 596	213	820	813	294	39	393	5 817
Indonesia	4 162 688	3 757 907	404 781	11 377	5 436	148 479	25 684	5 379	16 531	213 542

**Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Pelayanan/Bantuan yang Diterima di Provinsi Aceh Tahun 2021**

**Table 17 Number of Micro and Small Scale Establishments by Types of Services Received in Aceh Province 2021**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Menerima Pelayanan Received Service		Jenis Pelayanan yang Diterima Setahun yang Lalu Types of Services Received a Year Ago					
		Tidak No	Ya Yes	Permodalan Capital	Bahan Baku Raw Material s	Pemasaran Marketing	Mesin Machine	Barang Modal/Peral atan Capital Goods/Equip ments	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Aceh	113 292	110 376	2 916	1 904	260	146	500	513	45
Indonesia	4 162 688	3 999 890	162 798	123 941	14 653	19 424	9 633	15 929	5 660

**Tabel Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan dari Koperasi di Provinsi Aceh Tahun 2021**

**Table 18 Number of Micro and Small Scale Establishments by Reason for Not Receiving Assistanhip in Aceh Province 2021**

Provinsi Province	Banyaknya Usaha Number of Establishment	Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan Reason for Not Receiving Assistanhip					
		Tidak Tahu Prosedur Not Knowing the Procedur	Proposal Ditolak Proposal Rejected	Tidak Berminat Not Interested	Tidak Tahu Not Knowing	Belum Ada Koperasi No Cooperative	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	113 292	26 442	7 240	14 296	42 361	15 836	4 201
Indonesia	4 162 688	977 397	79 361	745 092	1 259 287	813 799	124 954

**Tabel 19 Banyaknya Usaha Mikro dan menurut Penggunaan Internet dan Tujuan Menggunakan Internet di Provinsi Aceh Tahun 2021**

**Table 19 Number of Micro and Small Scale Establishments by Using Internet and The Purpose of Using The Internet in Aceh Province 2021**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Tidak Menggunakan Internet <i>Not Using Internet</i>	Mengguna kan Internet Using Internet	Tujuan Menggunakan Internet <i>The Purpose of Using The Internet</i>				
				Promosi/Iklan Penjualan <i>Promotion/ Advertising</i>	Pemasaran/ Penjualan Produk <i>Marketing/ Product Sale</i>	Pembelian Bahan Baku <i>Purchase of Raw Materials</i>	Pinjaman Fintech <i>Fintech Loans</i>	Pencarian Informasi <i>Information</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aceh	113 292	98 383	14 909	7 118	10 625	3 833	46	3 936
Indonesia	4 162 688	3 209 699	952 989	432 731	745 138	314 843	7 444	210 460

**Tabel 20 Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Konsumen Utama di Provinsi Aceh Tahun 2021**

**Table 20 Number of Micro and Small Scale Establishments by Main Consumer in Aceh Province 2021**

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Konsumen Utama <i>Main Costumer</i>				
		Konsumen Akhir (Rumah Tangga) <i>Household</i>	Pedagang Eceran <i>Retailers</i>	Pedagang Besar <i>Distributors</i>	Industri/ Pelaku Komersial Lainnya <i>Industries/Other Commercial Business</i>	Pemerintah/ Institusi <i>Government/ Institution</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	113 292	62 059	25 248	23 780	1 923	282
Indonesia	4 162 688	1 954 986	836 904	1 161 434	191 797	17 567

**Tabel 21** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Terdampak Pandemi dan Dampak yang Dirasakan di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 21** *Number of Micro and Small Scale Establishments Impacted by Pandemic and Impact Received in Aceh Province 2021*

Provinsi <i>Province</i>	Banyaknya Usaha <i>Number of Establishment</i>	Tidak Terdampak Pandemi <i>Not Affected by Pandemic</i>	Terdampak Pandemi <i>Impacted by Pandemic</i>	Dampak yang Dirasakan <i>Impact Received</i>					
				Permintaan/ Penjualan Menurun <i>Demand Drops</i>	Penundaan Pembayaran Pembeli <i>Buyer Payment Delay</i>	Bahan Baku Langka <i>Rare Raw Material</i>	Bahan Baku Mahal <i>Expensive Raw Material</i>	Kehadiran Pekerja Berkurang <i>Reduced Worker Attendance</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Aceh	113 292	44 047	69 245	64 587	14 757	9 196	32 138	2 254	775
Indonesia	4 162 688	1 116 147	3 046 541	2 779 938	827 880	472 324	1 103 495	169 461	146 061

**Tabel 22** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Strategi Menghadapi Dampak Pandemi di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 22** *Number of Micro and Small Scale Establishments by Strategies for Facing the Impact of a Pandemic in Aceh Province 2021*

Provinsi <i>Province</i>	Terdampak Pandemi <i>Impacted by Pandemic</i>	Strategi Menghadapi Dampak Pandemi <i>Strategies for Facing the Impact of a Pandemic</i>						
		Menghentikan Produksi <i>Demand Drops</i>	Mengurangi Pekerja <i>Buyer Payment Delay</i>	Mengurangi Hari/Jam Kerja <i>Rare Raw Material</i>	Pemasaran Secara Online <i>Online Marketing</i>	Berganti Jenis Produk <i>Changing Product Type</i>	Pindah Lapangan Usaha <i>Changing Business Fields</i>	Tidak Ada Strategi <i>No Strategy</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Aceh	69 245	42 171	14 090	35 484	5 751	325	3 879	2 316
Indonesia	3 046 541	1 844 812	448 142	1 521 947	395 244	23 988	48 683	150 549

**Tabel 23** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Bantuan/Kebijakan yang Dibutuhkan Menghadapi Pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 23** *Number of Micro and Small Scale Establishments by Help/Policy Needed Against Pandemic Covid-19 Impact in Aceh Province 2021*

Provinsi <i>Province</i>	Terdampak Pandemi <i>Impacted by Pandemic</i>	Bantuan/Kebijakan yang Dibutuhkan <i>Help/Policy Needed</i>							
		Penundaan Bayar Pinjaman <i>Postpone of Loan Payment</i>	Penundaan Bayar Pajak <i>Postpone of Tax Payment</i>	Bantuan Modal Usaha <i>Capital Assistance</i>	Kemudahan Administrasi Pengajuan Pinjaman <i>Easing of Credit Application</i>	Keringanan Tagihan Listrik <i>Electricity Bill Support</i>	Kelonggaran Pembatasan Sosial <i>Easing of Restrictions on Social</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Ada <i>None</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
Aceh	69 245	8 497	11 084	63 793	22 248	36 514	21 075	1 448	2 475
Indonesia	3 046 541	423 656	513 656	2 566 117	819 713	1 513 617	1 549 829	80 253	176 710

**Tabel 24** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Terdampak Pandemi Covid-19 menurut Perkiraan Lama Usaha Dapat Bertahan Bila Tidak Ada Bantuan di Provinsi Aceh Tahun 2021  
**Table 24** *Number of Micro and Small Scale Establishments Affected by Pandemic Covid-19 by Estimate Length of Business/Company Can Survive Without Assistance in Aceh Province 2021*

Provinsi <i>Province</i>	Terdampak Pandemi <i>Impacted by Pandemic</i>	Perkiraan Lama Usaha/Perusahaan Dapat Bertahan Tanpa Bantuan <i>Estimate Length of Business/Company Can Survive Without Assistance</i>			
		Kurang Dari 1 Bulan/ <i>Month</i>	1- 3 Bulan/ <i>Months</i>	Lebih Dari 3 Bulan/ <i>Months</i>	Tidak Tahu <i>Don't Know</i>
(1)	(2)	(3)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69 245	5 370	6 133	14 507	43 235
Indonesia	3 046 541	63 854	204 095	686 309	2 092 283

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121

Telp : (065) 23005

Fax : (0651) 33632

Email : [bps1100@bps.go.id](mailto:bps1100@bps.go.id)

Homepage : [aceh.bps.go.id](http://aceh.bps.go.id)